

**EVALUASI ANGKUTAN KERETA API
PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
(*PUBLIC SERVICE OBLIGATION/PSO*) (Studi Kasus: Kereta
Api PSO di Divisi Regional 2 Sumatera Barat)**

TUGAS AKHIR



**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG
2025**

**EVALUASI ANGKUTAN KERETA API
PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
(*PUBLIC SERVICE OBLIGATION/PSO*) (Studi Kasus: Kereta
Api PSO di Divisi Regional 2 Sumatera Barat)**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
Program Strata-1 pada Departemen Teknik Sipil,
Fakultas Teknik, Universitas Andalas



Oleh:

RAZAAN AZIZ
NIM:1910922028

Pembimbing:

Ir. Bayu Martanto Adji, S.T., M.T.,Ph.D.

Ir. Hendra Gunawan, M.T.

**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG
2025**

ABSTRAK

Transportasi berasal dari kata Latin, yaitu *transportare*, di mana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk dan wilayah terluas di dunia, hal tersebut menjadikan transportasi umum menjadi sangat penting dalam aspek mendukung perekonomian untuk berkembang, sehingga transportasi perlu ditata dengan baik dan serius untuk menjamin kenyamanan, ketertiban, keamanan, kecepatan, keselamatan dan dipadukan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Perkeretaapian merupakan sebuah kesatuan sistem yang terdiri atas sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan transportasi kereta api sesuai prosedur, norma, kriteria dan persyaratan. Transportasi perkeretaapian memiliki kelebihan dalam melaksanakan pengangkutan secara massal dan efektif. Moda transportasi ini adalah peluang yang besar bagi pemerintah dalam mewujudkan angkutan massal yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Standar pelayanan kereta api minimum telah diatur pemerintah melalui peraturan Menteri perhubungan NO PM 63 Tahun 2019. Dalam penyelenggaraan operasi kereta api, pemerintah dan penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyediakan angkutan yang memenuhi standar pelayanan minimum pada peraturan tersebut termasuk dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (PSO). Dengan adanya standar minimum pelayanan (SPM) ini, pengguna jasa akan menjamin kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan perkeretaapian, dan didapatkan kepuasan yang tinggi dari masyarakat dalam hal ini sebagai pengguna jasa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis seberapa baik layanan kereta api bersubsidi (PSO) di Sumatera Barat berdasarkan aturan pemerintah terbaru (Permenhub No 63 Tahun 2019) dengan fokus pada penumpang, menilai keberhasilan operasional kereta api bersubsidi di wilayah Divisi Regional 2 Sumatera Barat sesuai dengan perjanjian kerja sama tahun 2024 dan mengevaluasi Penyelenggaraan PSO Angkutan Kereta Api Divisi Regional 2 Sumatera Barat Berdasarkan Kontrak PSO Tahun Anggaran 2024.

Kata kunci : Kereta Api, Pelayanan Publik, Sumatera Barat, Angkutan, Evaluasi

ABSTRACT

Transportation originates from the Latin word transportare, where trans means across or to the other side, and portare means to carry or to bring. Thus, transportation means carrying or bringing something to the other side or from one place to another. Transportation can be defined as the effort and activity of moving goods and/or passengers from one place to another. Indonesia is one of the countries with the largest population and territory in the world, which makes public transportation very important in supporting its developing economy. Therefore, transportation needs to be managed well and seriously to ensure comfort, order, safety, speed, and security, and integrated according to the level of need. The railway is a unified system consisting of facilities, infrastructure, and human resources for the operation of train transportation in accordance with procedures, norms, criteria, and requirements. Railway transportation has the advantage of carrying out mass transport effectively. This mode of transportation presents a significant opportunity for the government to realize mass transit that meets existing needs. The minimum service standards for trains have been regulated by the government through the Minister of Transportation Regulation Number PM 63 of 2019. In the operation of trains, the government and operators have an obligation to provide transportation that meets the minimum service standards in said regulation, including in the implementation of public service obligations (PSO). With these minimum service standards (SPM), service users are guaranteed quality in the provision of railway services, leading to high satisfaction from the community as service users. The purpose of this research is to analyze how well the subsidized (PSO) train services in the West Sumatra perform based on the latest government regulation (Permenhub No 63 of 2019) with a focus on passengers, to assess the operational success of subsidized trains in the Regional Division 2 of West Sumatra in accordance with the 2024 cooperation agreement, and to evaluate the Implementation of PSO for Train Transport in Regional Division 2 of West Sumatra based on the 2024 PSO Budget Contract.

Keywords: Train, Public Service, West Sumatra, Transportation, Evaluation

